



**LAPORAN**

**HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI**

**PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN**

**SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN**

**JANUARI 2025**

**KEMENTERIAN HUKUM**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Hukum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan survei tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Kementerian Hukum dilakukan secara *real time* melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Survey Management* dan telah mendapat rekomendasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan nomor V-21.0000.002. Kegiatan survei tersebut dilakukan terhadap penerima pelayanan publik yang telah selesai menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan.

Semoga dengan adanya laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini, percepatan program peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum menjadi lebih terukur, sehingga perbaikan kualitas layanan lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan

Andry Indrady

# LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

## BAB I

### KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>1</sup> Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Survey Management*. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://survei-bsk.kemenkum.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Survey Management* mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Survey Management* diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

#### Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Hukum melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

#### I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



## II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang

administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



### III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

- Ya  
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan  
 Profesionalisme SDM  
 Kualitas Sarana Prasarana  
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik  
 Konsultasi dan Pengaduan  
 Penghilangan Praktik Pungli  
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur  
 Penghilangan Praktik Percaloan  
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

**Tanda Tangan**

## BAB II

### METODOLOGI SURVEI

#### A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Survey Management*. Penggunaan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Survey Management* sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://survei-bsk.kemenkum.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari **Krejcie and Morgan** (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

**Tabel Sampel Morgan dan Krejcie**

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Hukum adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Hukum.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah :
  1. Pegawai UPT : Imigrasi, Masyarakat, BHP, dan BADIKLAT yang telah selesai menerima layanan dari Kanwil.
  2. Notaris, Konsultan KI, Pemohon KI, OBH, Pegawai Biro/Bagian Hukum Pemerintah Prov/Kab/Kota, dan Pemohon Layanan Hukum lainnya;
  3. Pihak lain yang telah selesai menerima layanan.
- c. Responden SPAK-SPKP UPT Imigrasi :  
Pengguna Layanan Keimigrasian baik yang datang ke UPT Imigrasi maupun yang tidak memerlukan kehadiran fisik (online).  
(Contoh: Pemohon Paspor, Visa, KITAS, KITAP, dan lainnya)
- d. Responden SPAK-SPKP UPT Masyarakat :  
Pengguna Layanan Masyarakat baik yang datang ke UPT Masyarakat maupun yang tidak memerlukan kehadiran fisik (online).  
(Contoh: Pengguna layanan kunjungan yang hadir secara fisik maupun virtual, pengguna layanan penitipan barang, Pegawai Instansi lainnya yang menerima layanan, masyarakat yang melakukan konsultasi atau mencari informasi, dan lain sebagainya)
- e. Responden SPAK-SPKP BHP : Pengguna Layanan BHP
- f. Responden SPAK-SPKP BADIKLAT : Peserta Diklat
- g. Responden Survei Integritas Internal Organisasi :  
Seluruh Pegawai di masing-masing Unit Utama, Kantor Wilayah, UPT Imigrasi, UPT Masyarakat, BHP, BADIKLAT, dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum lainnya.

## B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Unit Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Survey Management, dengan cara melakukan *scan barcode* pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

## C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Survey Management, dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

## D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

## BAB III

### PENGOLAHAN SURVEI

#### A. Analisis Hasil Survei

##### 1. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) - IKM pada

Data Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) - IKM

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Januari	3.94	30,091	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94
<b>Nilai Agregat</b>		<b>3.94</b>	<b>30,091</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>

Pada pelaksanaan survei periode Januari 2025, secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.94 dalam skala 4 atau 17.24 dalam skala 17. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) pada periode Januari 2025. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

##### 2. Hasil Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) - IPK pada

Data Hasil Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) - IPK

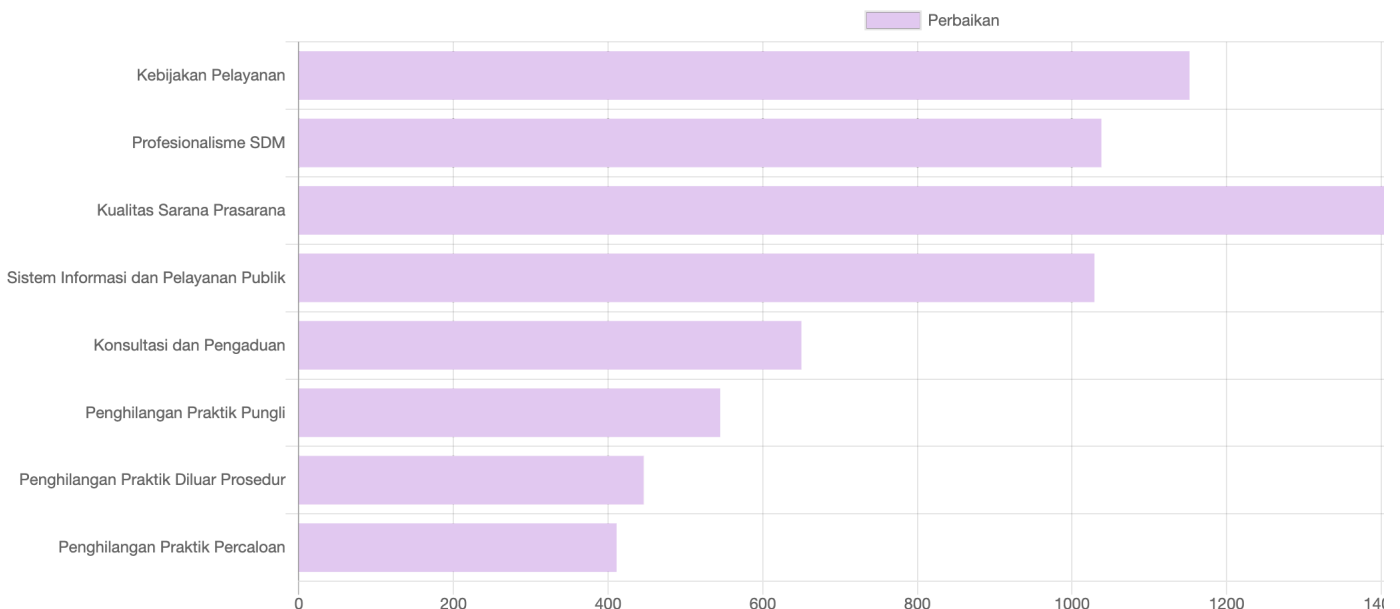
No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Januari	3.95	30,091	3.94	3.95	3.95	3.95	3.95
<b>Nilai Agregat</b>		<b>3.95</b>	<b>30,091</b>	<b>3.94</b>	<b>3.95</b>	<b>3.95</b>	<b>3.95</b>	<b>3.95</b>

Pada pelaksanaan survei periode Januari 2025, secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.95 dalam skala 4 atau 17.27 dalam skala 17. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) pada periode Januari 2025. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

##### 3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS *Survey Management*, terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



#### B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Evaluasi terhadap pelaksanaan unit kerja dilakukan secara berkala setiap 1 bulan sekali, dengan melakukan verifikasi secara online dan verifikasi random responden.

Berdasarkan analisa hasil survei, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

**BAB IV**  
**DATA SURVEI**

**A. DATA UNIT KERJA**

No.	Unit Kerja	Januari		
		IKM	IPK	Rsp.
1	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	3.90	3.93	31
2	BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR	3.89	3.89	32
3	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	3.87	3.94	31
4	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	3.80	3.82	29
5	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	3.65	3.65	32
6	BALAI PEMASYARAKATAN LHOKSEUMAWE	4	4	2
7	BALAI PEMASYARAKATAN AMBON	3.83	3.82	48
8	BALAI PEMASYARAKATAN AMUNTAI	3.99	3.99	30
9	BALAI PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	3.96	3.94	36
10	BALAI PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	4	4	32
11	BALAI PEMASYARAKATAN BAUBAU	4	4	31
12	BALAI PEMASYARAKATAN JAYAPURA	4	4	1
13	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG	4	4	7
14	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON	4	4	1
15	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA BARAT	3.91	3.90	42
16	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT	3.99	4	61
17	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN	3.99	3.97	8
18	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA TIMUR-UTARA	4	4	169
19	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANOKWARI	4	4	2
20	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG	3.84	3.82	45
21	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PEKANBARU	4	4	30
22	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	3.98	3.99	92
23	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA	4	4	31
24	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II A MATARAM	3.89	3.90	31
25	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR	3.89	3.87	51
26	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT	4	4	30
27	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO	4	4	149
28	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	4	4	45
29	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT	3.98	4	33
30	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MUARA BUNGO	4	4	1
31	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MUSI RAWAS UTARA	3.95	3.95	33
32	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II OKU INDUK	4	4	33
33	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PRINGSEWU	3.94	3.95	23
34	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMPIT	4	4	100
35	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG	3.97	3.98	25
36	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUMBAWA BESAR	3.98	3.98	39
37	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI	3.98	3.98	94
38	BALAI PEMASYARAKATAN KENDARI	4	4	13
39	BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PADANG	4	3.99	17
40	BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II BUKITINGGI	3.91	3.89	11
41	BALAI PEMASYARAKATAN KUPANG	4	4	2
42	BALAI PEMASYARAKATAN LUWUK	4	4	2
43	BALAI PEMASYARAKATAN MAKASSAR	4	3.99	48
44	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	3.93	3.92	44
45	BALAI PEMASYARAKATAN NAGAN RAYA	4	4	30
46	BALAI PEMASYARAKATAN PALOPO	3.90	3.87	31
47	BALAI PEMASYARAKATAN PALU	3.90	3.89	21
48	BALAI PEMASYARAKATAN SORONG	4	4	31
49	BALAI PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	3.99	4	13
50	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	3.98	3.97	31
51	BALAI PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	3.88	3.85	26
52	BALAI PEMASYARAKATAN WATAMPONE	4	4	43
53	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH	3.98	3.99	33
54	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM KEPULAUAN RIAU	3.97	3.99	37
55	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM SULAWESI UTARA	3.98	3.98	36
56	BAPAS KELAS I PALANGKARAYA	3.99	3.99	48
57	BAPAS KELAS I SEMARANG	4	4	38
58	BAPAS KELAS I SURAKARTA	3.97	3.97	35
59	BAPAS KELAS II BALIKPAPAN	4	4	3
60	BAPAS KELAS II BATULICIN	4	4	16
61	BAPAS KELAS II CIANGIR	4	3.99	18
62	BAPAS KELAS II FAK FAK	4	3.96	3

No.	Unit Kerja	Januari		
		IKM	IPK	Rsp.
63	BAPAS KELAS II KEEROM	3.96	3.97	7
64	BAPAS KELAS II KLATEN	3.94	3.95	57
65	BAPAS KELAS II MAGELANG	4	4	40
66	BAPAS KELAS II MUARA TEWEH	3.87	3.90	35
67	BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN	3.94	3.96	83
68	BAPAS KELAS II PANGKALAN BUN	3.96	3.96	30
69	BAPAS KELAS II PEKALONGAN	3.96	3.95	5
70	BAPAS KELAS II PURWOKERTO	3.95	3.95	36
71	BAPAS KELAS II SAMARINDA	4	4	25
72	BAPAS KELAS II TARAKAN	4	4	43
73	BAPAS KELAS II TIDORE	3.73	3.76	30
74	BPHN	3.85	3.89	86
75	BPSDM	3.83	3.87	570
76	Balai Pemasarakatan BOJONEGORO	3.91	3.91	31
77	Balai Pemasarakatan KEDIRI	3.98	3.98	30
78	Balai Pemasarakatan KELAS I DENPASAR	4	4	22
79	Balai Pemasarakatan KELAS II KARANGASEM	4	4	36
80	Balai Pemasarakatan MADIUN	3.80	3.84	38
81	Balai Pemasarakatan MALANG	4	4	30
82	Balai Pemasarakatan MANADO	3.77	3.84	20
83	Balai Pemasarakatan PAMEKASAN	3.87	3.94	32
84	Balai Pemasarakatan Pontianak	4	3.99	24
85	Balai Pemasarakatan SURABAYA	4	4	2
86	Balai Pemasarakatan BANDA ACEH	3.98	3.99	34
87	Balai Pemasarakatan KELAS II PANGKALPINANG	3.96	3.96	30
88	Balai Pemasarakatan KELAS II POLEWALI	3.88	3.89	43
89	Balai Pemasarakatan KUTACANE	3.68	3.69	16
90	Balai Pemasarakatan MEDAN	4	4	35
91	Balai Pemasarakatan SIBOLGA	4	4	30
92	Balai Pemasarakatan Sambas	3.99	4	23
93	Balai Pemasarakatan Sintang	3.98	3.99	13
94	DITJEN AHU	3.90	3.93	28
95	DITJEN IMIGRASI	4	4	8
96	DITJEN KI	3.62	3.63	104
97	DITJEN PEMASYARAKATAN	3.98	4	34
98	INSPEKTORAT JENDERAL	1.53	1.60	1
99	KANIM KELAS I PALANGKARAYA	3.93	4	1
100	KANIM KELAS I SEMARANG	3.99	3.98	12
101	KANIM KELAS I SURAKARTA	4	4	77
102	KANIM KELAS I TPI CILACAP	3.98	3.98	133
103	KANIM KELAS II PATI	4	4	30
104	KANIM KELAS II PEMALANG	4	4	32
105	KANIM KELAS II SAMPIT	3.90	3.93	29
106	KANIM KELAS II WONOSOBO	3.85	3.84	35
107	KANTOR IMIGRASI BALIKPAPAN	3.94	3.94	20
108	KANTOR IMIGRASI BANDAR LAMPUNG	3.98	3.99	32
109	KANTOR IMIGRASI BANJARMASIN	3.76	3.75	16
110	KANTOR IMIGRASI BAUBAU	3.98	3.99	35
111	KANTOR IMIGRASI BENGKULU	3.94	3.95	188
112	KANTOR IMIGRASI KALIANDA	3.60	3.60	46
113	KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMBILAHAN	3.98	3.98	30
114	KANTOR IMIGRASI KELAS I AMBON	3.90	3.94	28
115	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDA ACEH	3.97	3.97	30
116	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG	3.99	3.98	152
117	KANTOR IMIGRASI KELAS I BOGOR	3.97	3.97	319
118	KANTOR IMIGRASI KELAS I JAYAPURA	3.91	3.91	7
119	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM	3.96	3.94	105
120	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN	3.97	4	57
121	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	3.68	3.91	32
122	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	3.91	3.95	216
123	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA	4	4	245
124	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	3.80	3.80	3
125	KANTOR IMIGRASI KELAS I KUPANG	3.86	3.99	17
126	KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG	3.97	3.98	47
127	KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM	3.77	3.80	133
128	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK	3.99	3.98	60
129	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	3.88	3.88	29
130	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI MANOKWARI	3.95	3.96	38
131	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG	3.99	3.99	200

No.	Unit Kerja	Januari		
		IKM	IPK	Rsp.
132	KANTOR IMIGRASI KELAS I PALEMBANG	3.98	3.98	154
133	KANTOR IMIGRASI KELAS I PALU	3.99	3.99	411
134	KANTOR IMIGRASI KELAS I PANGKAL PINANG	3.98	3.98	103
135	KANTOR IMIGRASI KELAS I PEKANBARU	4	4	624
136	KANTOR IMIGRASI KELAS I POLEWALI MANDAR	3.92	3.90	33
137	KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA	3.99	3.99	72
138	KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PINANG	4	4	108
139	KANTOR IMIGRASI KELAS I TJ.PERAK	3.97	3.98	52
140	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI GORONTALO	4	4	144
141	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR	3.93	3.98	29
142	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	3.92	3.93	38
143	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI	4	4	32
144	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG	3.90	3.91	61
145	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK	4	4	98
146	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	3.86	3.95	41
147	KANTOR IMIGRASI KELAS II ATAMBUA	3.98	4	3
148	KANTOR IMIGRASI KELAS II BAGAN SIAPI-API	4	4	1
149	KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI	3.95	3.96	45
150	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG	3.99	3.99	253
151	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAWAN	3.97	3.96	33
152	KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKALIS	3.97	3.98	106
153	KANTOR IMIGRASI KELAS II BLITAR	3.96	3.97	31
154	KANTOR IMIGRASI KELAS II CIREBON	4	4	45
155	KANTOR IMIGRASI KELAS II DABO SINGKEP	4	4	34
156	KANTOR IMIGRASI KELAS II DUMAI	3.95	3.96	62
157	KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER	3.99	3.97	31
158	KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG	3.93	3.94	152
159	KANTOR IMIGRASI KELAS II KEDIRI	3.90	3.92	51
160	KANTOR IMIGRASI KELAS II LANGSA	3.96	3.97	31
161	KANTOR IMIGRASI KELAS II LHOKSEUMAWE	3.92	3.94	172
162	KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE	3.96	3.96	67
163	KANTOR IMIGRASI KELAS II MERAUKE	3.88	3.89	21
164	KANTOR IMIGRASI KELAS II MEULABOH	4	4	32
165	KANTOR IMIGRASI KELAS II MIMIKA	3.93	3.95	88
166	KANTOR IMIGRASI KELAS II MUARA ENIM	3.98	3.98	29
167	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI	3.91	3.91	91
168	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	3.98	3.98	31
169	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	3.99	3.99	65
170	KANTOR IMIGRASI KELAS II PAMEKASAN	3.99	4	20
171	KANTOR IMIGRASI KELAS II PAREPARE	3.98	3.80	6
172	KANTOR IMIGRASI KELAS II PEMATANG SIANTAR	4	4	136
173	KANTOR IMIGRASI KELAS II PONOROGO	4	4	10
174	KANTOR IMIGRASI KELAS II RANAI	3.93	3.98	31
175	KANTOR IMIGRASI KELAS II SABANG	4	4	1
176	KANTOR IMIGRASI KELAS II SELAT PANJANG	3.88	3.90	7
177	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA	3.96	3.97	204
178	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIBOLGA	3.98	3.99	38
179	KANTOR IMIGRASI KELAS II SORONG	3.70	3.76	2
180	KANTOR IMIGRASI KELAS II SUKABUMI	4	4	1
181	KANTOR IMIGRASI KELAS II SUMBAWA BESAR	3.97	4	34
182	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN	3.99	3.99	253
183	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG PANDAN	3.96	3.96	49
184	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNGPAN	3.98	3.98	118
185	KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA	4	4	60
186	KANTOR IMIGRASI KELAS II TJ. BALAI ASAHAN	3.96	3.96	34
187	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	3.97	3.98	33
188	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	3.80	3.79	301
189	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LABUAN BAJO	3.99	3.99	196
190	KANTOR IMIGRASI KELAS II TUAL	3.99	4	31
191	KANTOR IMIGRASI KELAS III BANGGAI	4	4	34
192	KANTOR IMIGRASI KELAS III BIMA	3.96	3.96	42
193	KANTOR IMIGRASI KELAS III TAKENGON	3.88	3.88	30
194	KANTOR IMIGRASI KENDARI	4	4	32
195	KANTOR IMIGRASI KLAS I MANADO	4	4	2
196	KANTOR IMIGRASI KLAS II BITUNG	3.94	3.94	27
197	KANTOR IMIGRASI KLAS II NON TPI AGAM	3.95	3.94	44
198	KANTOR IMIGRASI KLAS II TAHUNA	4	4	34
199	KANTOR IMIGRASI KLAS III KOTAMOBAGU	3.97	3.98	22
200	KANTOR IMIGRASI KOTABUMI	3.99	3.98	123

No.	Unit Kerja	Januari		
		IKM	IPK	Rsp.
201	KANTOR IMIGRASI NUNUKAN	3.97	3.98	40
202	KANTOR IMIGRASI PALOPO	3.91	3.92	30
203	KANTOR IMIGRASI SAMARINDA	3.89	3.91	38
204	KANTOR IMIGRASI TARAKAN	3.87	3.90	30
205	KANTOR IMIGRASI TPI KELAS I MAKASSAR	4	4	150
206	KANTOR IMIGRASI WAKATOBI	4	4	20
207	KANWIL BALI	3.97	3.97	46
208	KANWIL BANGKA BELITUNG	3.81	3.93	5
209	KANWIL BANTEN	3.89	3.91	53
210	KANWIL BENGKULU	3.93	3.95	15
211	KANWIL DI YOGYAKARTA	3.94	3.96	44
212	KANWIL DKI JAKARTA	3.96	3.97	63
213	KANWIL GORONTALO	4	4	2
214	KANWIL JAMBI	3.82	3.83	20
215	KANWIL JAWA BARAT	3.78	3.78	8
216	KANWIL JAWA TENGAH	3.83	3.87	132
217	KANWIL KALIMANTAN BARAT	3.80	3.87	33
218	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	3.79	3.84	58
219	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	3.75	3.80	54
220	KANWIL KEPULAUAN RIAU	3.93	3.91	32
221	KANWIL LAMPUNG	3.85	3.87	39
222	KANWIL MALUKU UTARA	3.71	3.73	42
223	KANWIL NTB	3.72	3.81	16
224	KANWIL NTT	4	4	1
225	KANWIL PAPUA BARAT	3.72	3.90	5
226	KANWIL RIAU	3.95	3.98	15
227	KANWIL SULAWESI SELATAN	3.87	3.92	20
228	KANWIL SULAWESI TENGAH	3.55	3.40	1
229	KANWIL SULAWESI TENGGARA	3.80	3.76	3
230	KANWIL SUMATERA BARAT	3.85	3.89	54
231	KANWIL SUMATERA SELATAN	3.96	3.97	34
232	KANWIL SUMATERA UTARA	4	4	51
233	Kantor Imigrasi KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI	3.99	3.99	34
234	Kantor Imigrasi KELAS I Pontianak	3.99	3.99	19
235	Kantor Imigrasi KELAS I TPI DENPASAR	3.92	3.94	47
236	Kantor Imigrasi KELAS II Entikong	3.96	3.94	34
237	Kantor Imigrasi KELAS II Sambas	3.97	3.96	34
238	Kantor Imigrasi KELAS II Sanggau	4	4	16
239	Kantor Imigrasi KELAS II Singkawang	4	4	62
240	Kantor Imigrasi KELAS II TPI SINGARAJA	3.96	3.97	63
241	Kantor Imigrasi KELAS III Ketapang	4	4	19
242	Kantor Imigrasi Kalas III Putusibau	3.61	4	30
243	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur	4	3.99	35
244	LAPAS KELAS I BATU NUSAKAMBANGAN	4	4	30
245	LAPAS KELAS I SEMARANG	4	4	27
246	LAPAS KELAS II A AMBARAWA	4	4	30
247	LAPAS KELAS II A BAGAN SIAPI-API	3.95	3.97	43
248	LAPAS KELAS II A BALIKPAPAN	4	4	10
249	LAPAS KELAS II A BONTANG	4	3.99	30
250	LAPAS KELAS II A KEMBANG KUNING NUSAKAMBANGAN	3.97	3.97	19
251	LAPAS KELAS II A KENDAL	3.91	3.91	58
252	LAPAS KELAS II A MAGELANG	4	4	45
253	LAPAS KELAS II A PALANGKARAYA	4	4	30
254	LAPAS KELAS II A PARE-PARE	4	4	31
255	LAPAS KELAS II A PEKALONGAN	3.93	3.93	41
256	LAPAS KELAS II A PERMISAN NUSAKAMBANGAN	4	4	1
257	LAPAS KELAS II A PURWOKERTO	3.92	3.97	31
258	LAPAS KELAS II A SAMARINDA	4	4	52
259	LAPAS KELAS II A TARAKAN	3.85	3.90	5
260	LAPAS KELAS II A TENGGARONG	3.72	3.80	30
261	LAPAS KELAS II B CILACAP	3.91	3.91	42
262	LAPAS KELAS II B MUARA TEWEH	3.94	3.93	13
263	LAPAS KELAS II B NUNUKAN	4	4	30
264	LAPAS KELAS II B PATI	3.98	4	31
265	LAPAS KELAS II B SELAT PANJANG	4	4	45
266	LAPAS KELAS II B TEGAL	3.98	3.99	39
267	LAPAS KELAS II B TELUK KUANTAN	4	4	58
268	LAPAS KELAS IIA CILEGON	3.98	3.98	104
269	LAPAS KELAS IIA PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	3.95	3.95	48

No.	Unit Kerja	Januari		
		IKM	IPK	Rsp.
270	LAPAS KELAS IIB IDI RAYEUK LANGSA	3.98	3.97	30
271	LAPAS KELAS IIB SLAWI	3.99	4	83
272	LAPAS KELAS IIB WONOSARI	3.99	3.99	41
273	LAPAS KELAS III ALAHAN PANJANG	3.96	3.96	30
274	LAPAS KELAS III ARJASA	4	4	9
275	LAPAS KELAS III BARUS	4	4	15
276	LAPAS KELAS III BATULICIN	4	4	11
277	LAPAS KELAS III DOBO	3.89	3.89	11
278	LAPAS KELAS III GESER	3.48	3.52	1
279	LAPAS KELAS III KAIMANA	4	4	1
280	LAPAS KELAS III KOTA PINANG	3.98	3.99	36
281	LAPAS KELAS III LABUHAN BILIK	4	4	35
282	LAPAS KELAS III MAMASA	3.66	3.62	98
283	LAPAS KELAS III NAMLEA	3.95	3.95	11
284	LAPAS KELAS III PANGURURAN	3.98	3.98	29
285	LAPAS KELAS III RANGKAS BITUNG	3.98	3.98	31
286	LAPAS KELAS III SUKAMARA	3.98	3.96	30
287	LAPAS KELAS III SULIKI	3.96	3.98	33
288	LAPAS KELAS III TALU	4	4	30
289	LAPAS KELAS III TELUK DALAM	4	4	77
290	LAPAS KELAS III WAHAI	3.59	3.58	2
291	LAPAS KHUSUS KELAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN	3.88	3.87	40
292	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A KASONGAN	3.77	3.77	64
293	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SAMARINDA	3.99	4	52
294	LAPAS NARKOTIKA KELAS II NUSAKAMBANGAN	4	4	53
295	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB PURWOKERTO	3.93	3.94	45
296	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	4	4	136
297	LAPAS PEMUDA KELAS II A MADIUN	3.79	3.77	30
298	LAPAS PEMUDA KELAS IIB PLANTUNGAN	3.96	3.97	35
299	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PALANGKARAYA	4	4	31
300	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	4	3.99	19
301	LAPAS TERBUKA KELAS IIB KENDAL	4	4	31
302	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SALEMBA	3.96	3.96	39
303	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBON	3.99	4	30
304	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMPANA	3.98	4	10
305	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ARGAMAKMUR	4	4	38
306	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA	4	4	3
307	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	3.98	3.98	32
308	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATAM	4	4	50
309	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAUBAU	3.97	3.99	18
310	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	3.94	4	17
311	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	4	4	8
312	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA	3.95	3.92	30
313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	4	4	40
314	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	4	4	30
315	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	4	4	11
316	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAHI	3.96	3.95	69
317	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG	3.88	3.88	61
318	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON	4	4	41
319	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR	3.90	3.92	44
320	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG	4	4	41
321	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN	3.96	3.99	10
322	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	3.88	3.88	32
323	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANCEUY BANDUNG	3.99	3.99	200
324	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG	3.95	3.96	6
325	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BEKASI	4	4	31
326	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOGOR	4	4	1
327	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIBINONG	3.97	3.98	34
328	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG	4	4	50
329	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KARAWANG	4	4	34
330	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTABUMI	3.96	3.98	30
331	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUNINGAN	4	4	32
332	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MATARAM	4	4	30
333	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SUBANG	4	4	101
334	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR	4	4	31
335	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CIAMIS	4	4	107
336	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CIANJUR	4	4	31
337	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B DOMPU	3.89	3.88	37
338	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH	3.92	3.94	31

No.	Unit Kerja	Januari		
		IKM	IPK	Rsp.
339	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B INDRAMAYU	4	4	72
340	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MAJALENGKA	4	4	49
341	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PURWAKARTA	3.97	3.97	37
342	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PURWODADI	4	4	13
343	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SELONG	3.95	3.97	32
344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SUKABUMI	4	4	50
345	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SUMEDANG	4	4	33
346	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TASIKMALAYA	3.96	3.97	31
347	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WONOGIRI	3.89	3.91	19
348	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT	3.99	3.98	31
349	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II LUBUK LINGGAU	4	4	33
350	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II MUARA ENIM	3.98	3.97	33
351	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II SEKAYU	4	4	36
352	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II TANJUNG RAJA	4	4	52
353	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN	3.98	3.98	30
354	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKALIS	3.92	3.92	39
355	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO	3.88	3.93	200
356	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI	3.88	3.92	30
357	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SERANG	4	4	4
358	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN	4	4	81
359	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA	3.99	3.99	50
360	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO	3.81	3.82	32
361	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG	3.99	3.98	31
362	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BOALEMO	4	4	25
363	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG	3.73	3.76	32
364	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KAYUAGUNG	4	4	32
365	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALA TUNGKAL	3.98	3.98	30
366	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAROS	4	4	3
367	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA	4	3.99	31
368	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BULIAN	3.97	3.97	35
369	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA TEBO	3.94	3.95	34
370	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA	3.94	3.96	31
371	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PANGARAYAN	4	4	96
372	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POHUWATO	3.98	4	31
373	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN	3.99	4	32
374	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT	4	4	34
375	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHA	4	4	6
376	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA	3.97	3.94	33
377	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PAGARALAM	3.91	3.93	35
378	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PARIGI	4	4	30
379	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SAROLANGUN	3.99	3.99	50
380	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SAROLANGUN RAWAS	3.98	3.98	31
381	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDARI	3.98	3.98	30
382	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS II B SENTUL	3.91	3.96	9
383	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	3.99	4	27
384	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO	3.92	3.93	45
385	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BUKITINGGI	3.80	3.80	3
386	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG	3.78	3.90	46
387	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUBUK BASUNG	3.92	3.91	52
388	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PARIAMAN	3.83	3.88	33
389	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PAYAKUMBUH	4	4	63
390	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SIJUNJUNG	3.90	3.90	24
391	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SOLOK	3.78	3.82	48
392	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	4	4	30
393	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	4	4	27
394	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUWUK	4	4	36
395	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	4	4	3
396	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	4	4	46
397	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG	3.95	3.96	30
398	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON	3.96	3.96	38
399	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR	3.96	3.96	44
400	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A JAKARTA	4	3.96	6
401	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	3.76	3.81	31
402	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	3.99	3.99	107
403	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	3.99	4	50
404	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III MUARA SABAK	4	4	17
405	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGGUMINASA	3.89	3.93	38
406	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TANJUNG PINANG	4	4	32
407	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALOPO	3.97	3.99	30

No.	Unit Kerja	Januari		
		IKM	IPK	Rsp.
408	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	3.98	4	52
409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A JAKARTA	4	4	9
410	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI	4	4	32
411	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN BENGKULU	4	4	7
412	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG	3.96	3.98	30
413	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA KEROBOKAN	3.99	4	37
414	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU	3.93	3.92	59
415	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG	3.99	3.99	36
416	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	4	4	75
417	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	3.91	3.95	14
418	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III GORONTALO	4	4	63
419	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MANOKWARI	3.94	3.95	30
420	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM	3.88	3.91	34
421	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU	3.93	3.91	39
422	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE	3.94	3.96	32
423	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KENDARI	3.99	4	30
424	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB BATAM	3.96	3.97	33
425	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB PADANG	3.95	3.98	31
426	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS III JAYAPURA	3.80	3.84	6
427	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG	3.96	3.97	32
428	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PIRU	3.90	3.88	30
429	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	4	4	1
430	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAKALAR	3.99	4	32
431	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANAH MERAH	4	4	3
432	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	3.85	3.91	32
433	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS II B LOMBOK TENGAH	4	4	29
434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS III RUMBAL	4	4	1
435	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA WAIKABUBAK	3.92	3.93	22
436	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERORIS KELAS II A GUNUNG SINDUR	4	4	33
437	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	3.86	3.84	25
438	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TUAL	4	4	33
439	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	3.91	3.91	13
440	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA BANDAR LAMPUNG	3.97	3.97	27
441	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA	3.97	3.95	30
442	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	3.98	3.98	32
443	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	4	3.99	32
444	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMUNTAI	3.92	3.92	31
445	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARBARU	3.81	3.79	36
446	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	3.98	3.97	33
447	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTABARU	3.99	3.99	48
448	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KARANG INTAN	3.94	3.93	37
449	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MARTAPURA	3.85	3.85	36
450	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MUARA BULIAN	3.97	3.97	30
451	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BENGKULU	3.98	3.99	50
452	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGERANG	3.94	3.88	8
453	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	4	4	12
454	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG	3.95	3.89	31
455	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BATAM	3.95	3.97	58
456	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II GORONTALO	3.96	4	2
457	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA	3.88	3.88	27
458	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II LOMBOK TENGAH	3.91	3.89	31
459	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS	3.91	3.93	34
460	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SUNGAI RAYA	4	4	15
461	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TENGGARONG	4	4	4
462	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA	3.97	3.97	40
463	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KENDARI	4	4	28
464	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO	3.94	3.95	38
465	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK MANOKWARI	3.74	3.70	2
466	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK MARTAPURA	3.92	3.94	10
467	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PEKANBARU	3.94	3.94	36
468	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TANJUNG PATI	4	4	30
469	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA	3.77	3.76	30
470	LPKA / LPAS PALEMBANG	4	4	31
471	Lapas Perempuan Kelas III Ambon	3.91	3.91	7
472	Lembaga Pemasyarakatan KELAS II Pontianak	3.97	3.98	32
473	Lembaga Pemasyarakatan KELAS II Sintang	3.87	3.89	29
474	Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA MANADO	3.95	3.95	33
475	Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIB TONDANO	4	4	30
476	Lembaga Pemasyarakatan KLAS III AMURANG	4	4	4

No.	Unit Kerja	Januari		
		IKM	IPK	Rsp.
477	Lembaga Pemasyarakatan KLAS III LIRUNG	3.95	3.94	31
478	Lembaga Pemasyarakatan ANAK KELAS I BLITAR	4	4	30
479	Lembaga Pemasyarakatan BINJAI	4	4	42
480	Lembaga Pemasyarakatan GUNUNG SITOLI	4	4	41
481	Lembaga Pemasyarakatan KELAS I MALANG	3.78	3.74	53
482	Lembaga Pemasyarakatan KELAS I SURABAYA	3.85	3.85	30
483	Lembaga Pemasyarakatan KELAS II Ketapang	4	4	20
484	Lembaga Pemasyarakatan KELAS II Singkawang	3.96	3.94	53
485	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIA BANDA ACEH	3.89	3.90	33
486	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIA BANYUWANGI	3.89	3.90	31
487	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIA BOJONEGORO	3.98	3.97	33
488	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIA KEDIRI	4	4	2
489	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIA KEROBOKAN	4	4	20
490	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIA LHOKSEUMAWE	4	4	20
491	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIA PAMEKASAN	3.95	3.97	30
492	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIA SIDOARJO	4	4	30
493	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB BLANGKEJEREN	3.89	3.93	31
494	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB BLITAR	3.85	3.89	32
495	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB BONDOWOSO	3.91	3.93	8
496	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB IDI	4	4	4
497	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB JOMBANG	3.84	3.84	39
498	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB KARANGASEM	3.96	3.96	31
499	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB KOTA BAKTI	3.99	4	30
500	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB LAMONGAN	3.85	3.86	25
501	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB LHOKSUKON	3.95	3.96	33
502	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB LUMAJANG	3.95	3.95	125
503	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB MOJOKERTO	3.92	3.91	30
504	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB NGAWI	3.96	3.97	49
505	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB PASURUAN	4	3.99	9
506	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB POLEWALI	3.98	3.98	31
507	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB PROBOLINGGO	4	4	56
508	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB SINGARAJA	4	4	97
509	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB TABANAN	3.95	3.96	45
510	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB TUBAN	3.98	3.98	30
511	Lembaga Pemasyarakatan KELAS IIB TULUNGAGUNG	3.97	3.98	21
512	Lembaga Pemasyarakatan KELAS III CALANG	3.88	3.89	18
513	Lembaga Pemasyarakatan KELAS III LHOKNGA	4	3.99	13
514	Lembaga Pemasyarakatan KELAS III SINABANG	3.88	3.88	5
515	Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIB KUALA SIMPANG	3.99	3.98	31
516	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang	3.81	3.70	30
517	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan	4	4	65
518	Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Pangkalpinang	4	4	43
519	Lembaga Pemasyarakatan LABUHAN RUKU	4	4	30
520	Lembaga Pemasyarakatan LUBUK PAKAM	3.40	3.40	35
521	Lembaga Pemasyarakatan MEDAN	4	4	33
522	Lembaga Pemasyarakatan NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI	3.99	3.98	33
523	Lembaga Pemasyarakatan NARKOTIKA KELAS III LANGKAT	3.94	3.94	32
524	Lembaga Pemasyarakatan NARKOTIKA LANGSA	3.97	3.98	20
525	Lembaga Pemasyarakatan NARKOTIKA PAMEKASAN	4	4	20
526	Lembaga Pemasyarakatan NARKOTIKA PEMATANG SIANTAR	3.95	3.95	56
527	Lembaga Pemasyarakatan PADANG SIDEMPUAN	4	3.99	31
528	Lembaga Pemasyarakatan PEMATANG SIANTAR	4	4	31
529	Lembaga Pemasyarakatan PEMUDA KLAS III LANGKAT	4	4	35
530	Lembaga Pemasyarakatan PEREMPUAN KLAS II SIGLI	3.87	3.82	30
531	Lembaga Pemasyarakatan PEREMPUAN KLAS IIB MANADO	4	4	4
532	Lembaga Pemasyarakatan PEREMPUAN MEDAN	3.94	3.95	34
533	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan KELAS II Pontianak	4	4	3
534	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan KELAS III MAMUJU	3.94	3.93	25
535	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang	4	4	31
536	Lembaga Pemasyarakatan RANTAU PRAPAT	4	4	8
537	Lembaga Pemasyarakatan SIBOLGA	4	3.98	21
538	Lembaga Pemasyarakatan SIBORONG-BORONG	4	4	35
539	Lembaga Pemasyarakatan TANJUNG BALAI ASAHAN	4	4	31
540	Lembaga Pemasyarakatan TEBINGTINGGI DELI	4	4	30
541	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ambon, Provinsi Maluku	3.92	3.93	17
542	Lembaga Pembinaan Khusus Anak BANDA ACEH	4	3.99	29
543	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II KARANGASEM	4	4	30
544	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang	3.91	3.96	14
545	POLITEKNIK IMIGRASI - POLTEKIM	3.96	3.96	95

No.	Unit Kerja	Januari		
		IKM	IPK	Rsp.
546	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN - POLTEKIP	3.97	3.97	406
547	Pusat Data dan Teknologi Informasi	4	4	1
548	RUDENIM SEMARANG	3.91	3.91	37
549	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	3.96	3.96	14
550	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	3.98	3.98	48
551	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	4	4	57
552	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	3.88	3.90	37
553	RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU	3.99	4	7
554	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TJ PINANG	3.97	3.97	49
555	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANJARMASIN	3.66	3.88	2
556	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BENGKALIS	3.94	4	5
557	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAYAPURA	3.98	3.99	38
558	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDUNG	3.98	3.98	33
559	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I CIREBON	4	4	35
560	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I GORONTALO	4	4	4
561	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA BARAT	4	4	5
562	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT	3.77	3.79	19
563	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA SELATAN	3.74	3.70	2
564	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA TIMUR	4	4	3
565	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAMBI	3.96	3.97	30
566	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MANOKWARI	4	4	1
567	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALEMBANG	4	4	1
568	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I YOGYAKARTA	4	4	18
569	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BANTUL	3.91	3.88	5
570	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BATURAJA	4	4	7
571	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II INDRAMAYU	4	4	32
572	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II SERANG	4	4	3
573	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WATES	4	4	30
574	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI	3.97	3.99	31
575	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KENDARI	4	4	4
576	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	3.93	3.97	30
577	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KUPANG	3.99	4	9
578	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MAKASSAR	3.74	3.70	2
579	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU	3.96	3.97	7
580	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA RENGAT	4	4	3
581	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	3.95	3.96	36
582	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TANJUNG PINANG	4	4	30
583	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG	3.94	3.93	81
584	RUMAH TAHANAN BATAM	4	4	33
585	RUMAH TAHANAN DONGGALA	3.98	3.98	31
586	RUMAH TAHANAN KELAS I BANDUNG	4	4	14
587	RUMAH TAHANAN KELAS I CIREBON	3.98	3.98	35
588	RUMAH TAHANAN KELAS I DEPOK	4	4	32
589	RUMAH TAHANAN KELAS I TANJUNG PINANG	3.94	3.95	67
590	RUMAH TAHANAN KELAS II B GARUT	4	4	37
591	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	4	4	39
592	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	4	4	4
593	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	3.70	3.71	30
594	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	3.97	3.99	12
595	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	4	4	50
596	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTAENG	4	4	33
597	RUMAH TAHANAN NEGARA BARABAI	3.40	4	285
598	RUMAH TAHANAN NEGARA BENGKULU	3.97	3.97	47
599	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	4	4	17
600	RUMAH TAHANAN NEGARA JENEPONTO	4	4	38
601	RUMAH TAHANAN NEGARA KANDANGAN	4	4	42
602	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	3.93	3.81	41
603	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG	3.91	3.89	35
604	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT	4	4	18
605	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PALEMBANG	3.89	3.89	55
606	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PONDOK BAMBU	3.99	4	41
607	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANGERANG	4	4	75
608	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B DUMAI	4	4	211
609	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B RENGAT	4	4	33
610	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B SIAK SRI INDRAPURA	3.98	3.98	105
611	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II BATURAJA	3.94	3.93	34
612	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II PRABUMULIH	4	4	30
613	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA YOGYAKARTA	3.95	3.95	40
614	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANTUL	3.99	3.98	37

No.	Unit Kerja	Januari		
		IKM	IPK	Rsp.
615	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA	4	4	118
616	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANDEGLANG	3.97	3.97	34
617	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SERANG	3.99	3.98	60
618	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SUNGAI PENUH	3.99	3.99	32
619	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WATES	4	4	32
620	RUMAH TAHANAN NEGARA KENDARI	3.96	3.94	20
621	RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB BATUSANGKAR	4	4	8
622	RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB LUBUK SIKAPING	3.84	3.82	29
623	RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB PADANG	3.95	3.94	6
624	RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB PADANG PANJANG	4	4	2
625	RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB PAINAN	3.82	3.82	10
626	RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB SAWAHLUNTO	4	4	16
627	RUMAH TAHANAN NEGARA KOLAKA	4	4	31
628	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	3.99	3.99	20
629	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	3.96	3.96	30
630	RUMAH TAHANAN NEGARA LARANTUKA	3.99	4	41
631	RUMAH TAHANAN NEGARA MAKALE	3.83	3.92	3
632	RUMAH TAHANAN NEGARA MAKASSAR	3.94	3.96	28
633	RUMAH TAHANAN NEGARA MALINO	3.91	3.93	31
634	RUMAH TAHANAN NEGARA MARABAHAN	4	4	9
635	RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA	3.95	3.95	28
636	RUMAH TAHANAN NEGARA MASOHI	3.98	3.98	30
637	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE	3.83	3.83	14
638	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	3.99	3.99	31
639	RUMAH TAHANAN NEGARA PELAIHARI	4	4	55
640	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	3.81	3.81	30
641	RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	3.83	3.84	19
642	RUMAH TAHANAN NEGARA RAHA	3.97	3.99	49
643	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	4	4	53
644	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	4	4	3
645	RUMAH TAHANAN NEGARA SELAYAR	3.96	3.93	30
646	RUMAH TAHANAN NEGARA SENGKANG	3.88	3.88	33
647	RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	3.89	3.82	32
648	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	3.93	3.90	31
649	RUMAH TAHANAN NEGARA SOE	3.99	4	33
650	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG	3.99	3.97	30
651	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	4	4	33
652	RUMAH TAHANAN PALU	4	4	16
653	RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG	3.96	3.98	33
654	RUMAH TAHANAN POSO	3.89	3.88	41
655	RUPBASAN KELAS I SEMARANG	3.90	3.90	14
656	RUPBASAN KELAS II CILACAP	4	4	31
657	RUPBASAN KELAS II MAMUJU	3.70	3.58	2
658	RUPBASAN KELAS II PEKALONGAN	3.99	3.99	21
659	RUPBASAN KELAS II PURBALINGGA	4	4	16
660	RUPBASAN KELAS II PURWOKERTO	4	4	31
661	RUPBASAN KELAS II SRAGEN	3.91	3.94	12
662	RUPBASAN MANADO	4	4	2
663	RUTAN KELAS I SURAKARTA	3.92	3.92	30
664	RUTAN KELAS II A PALANGKARAYA	3.96	3.94	30
665	RUTAN KELAS II A PEKALONGAN	3.87	3.89	11
666	RUTAN KELAS II A SAMARINDA	3.99	4	26
667	RUTAN KELAS II B BALIKPAPAN	3.98	3.98	55
668	RUTAN KELAS II B BANJARNEGARA	4	4	31
669	RUTAN KELAS II B BANYUMAS	3.69	3.78	30
670	RUTAN KELAS II B BLORA	3.99	3.99	32
671	RUTAN KELAS II B DEMAK	4	4	41
672	RUTAN KELAS II B JEPARA	4	3.99	32
673	RUTAN KELAS II B KEBUMEN	4	4	11
674	RUTAN KELAS II B KUDUS	3.96	3.98	32
675	RUTAN KELAS II B MANINJAU	3.98	3.98	30
676	RUTAN KELAS II B MUARA LABUH	4	4	27
677	RUTAN KELAS II B MUNTOK	4	4	33
678	RUTAN KELAS II B PURWOREJO	3.94	3.95	30
679	RUTAN KELAS II B REMBANG	4	4	30
680	RUTAN KELAS II B SALATIGA	4	4	30
681	RUTAN KELAS II B SIBUHUAN	3.97	4	11
682	RUTAN KELAS II B SIDENRENG RAPANG SIDRAP	3.91	3.91	40
683	RUTAN KELAS II B TAKENGON	4	3.99	20

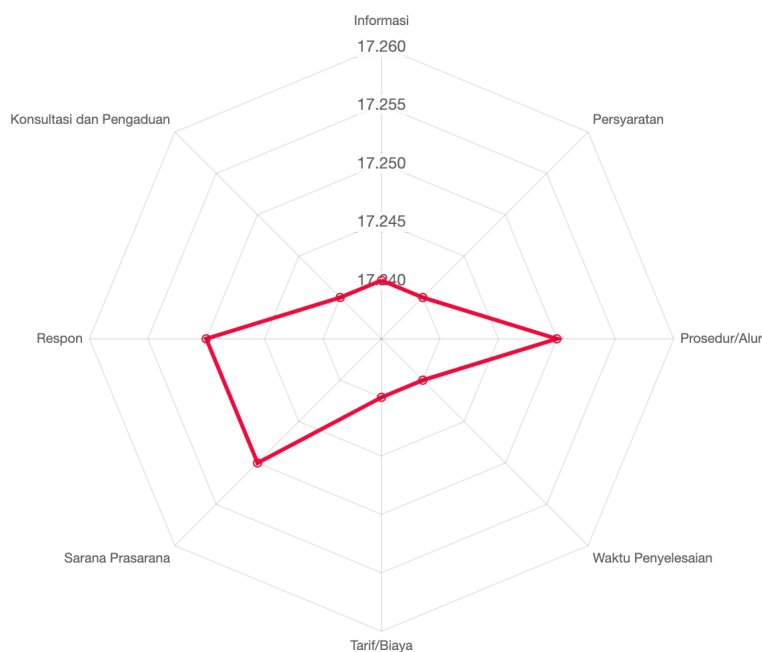
No.	Unit Kerja	Januari		
		IKM	IPK	Rsp.
684	RUTAN KELAS II B TAMIANG LAYANG	4	4	33
685	RUTAN KELAS II B TANAH GROGOT	4	4	31
686	RUTAN KELAS II B TANJUNG BALAI KARIMUN	3.99	4	33
687	RUTAN KELAS II B TEMANGGUNG	3.92	3.90	20
688	RUTAN KELAS II B WONOSOBO	3.96	3.97	105
689	RUTAN KELAS II MEMPAWAH	3.72	3.75	19
690	Rumah Detensi Imigrasi DENPASAR	3.97	3.98	42
691	Rumah Detensi Imigrasi KELAS II Pontianak	3.93	3.93	30
692	Rumah Detensi Imigrasi MEDAN	3.98	3.98	41
693	Rumah Detensi Imigrasi SURABAYA	3.78	3.82	8
694	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara BLITAR	3.88	3.88	30
695	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara JOMBANG	4	4	32
696	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara KELAS II PANGKALPINANG	3.40	3.40	1
697	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I DENPASAR	3.98	3.95	30
698	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara MEDAN	3.96	3.96	17
699	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara MOJOKERTO	4	4	31
700	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pontianak	3.89	3.91	14
701	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sanggau	4	4	3
702	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Singkawang	3.40	3.40	8
703	Rumah Tahanan KELAS IIB GIANYAR	4	4	31
704	Rumah Tahanan KELAS IIB KLUNGKUNG	4	4	39
705	Rumah Tahanan BALIGE	4	4	40
706	Rumah Tahanan JANTHO	3.90	3.94	16
707	Rumah Tahanan KABANJAHE	3.96	3.98	30
708	Rumah Tahanan KELAS I SURABAYA	3.96	3.96	31
709	Rumah Tahanan KELAS II Bengkayang	3.73	3.66	30
710	Rumah Tahanan KELAS II Landak	3.74	3.73	17
711	Rumah Tahanan KELAS II Pontianak	3.98	3.98	30
712	Rumah Tahanan KELAS II Sanggau	3.86	3.86	34
713	Rumah Tahanan KELAS II putusibau	4	4	48
714	Rumah Tahanan KELAS IIB BANDA ACEH	3.86	3.88	50
715	Rumah Tahanan KELAS IIB BANGIL	3.98	3.98	31
716	Rumah Tahanan KELAS IIB BANGKALAN	4	4	4
717	Rumah Tahanan KELAS IIB BANGLI	4	4	32
718	Rumah Tahanan KELAS IIB GRESIK	3.94	3.99	30
719	Rumah Tahanan KELAS IIB KRAKSAAN	4	4	30
720	Rumah Tahanan KELAS IIB MAGETAN	3.97	3.97	30
721	Rumah Tahanan KELAS IIB MAJENE	4	4	43
722	Rumah Tahanan KELAS IIB MAMUJU	4	4	2
723	Rumah Tahanan KELAS IIB PACITAN	3.92	3.92	38
724	Rumah Tahanan KELAS IIB PASANGKAYU	3.99	4	30
725	Rumah Tahanan KELAS IIB PONOROGO	3.89	3.89	30
726	Rumah Tahanan KELAS IIB SAMPANG	4	4	32
727	Rumah Tahanan KELAS IIB SITUBONDO	4	4	35
728	Rumah Tahanan KELAS IIB SUMENEP	3.99	4	39
729	Rumah Tahanan KELAS IIB TRENGGALEK	4	4	46
730	Rumah Tahanan KELAS IIB BENER MERIAH	4	4	27
731	Rumah Tahanan KLAS IIA KOTAMOBAGU	4	4	41
732	Rumah Tahanan KLAS IIA MANADO	4	4	31
733	Rumah Tahanan Kals II Sambas	4	4	40
734	Rumah Tahanan LABUHAN DELI	4	4	45
735	Rumah Tahanan MEDAN	4	4	31
736	Rumah Tahanan PANGKALAN BRANDAN	3.99	3.98	40
737	Rumah Tahanan PEREMPUAN KLAS IIA MEDAN	4	4	31
738	Rumah Tahanan PEREMPUAN SURABAYA	3.89	3.93	37
739	Rumah Tahanan SABANG	3.82	3.84	30
740	Rumah Tahanan SIDIKALANG	4	4	22
741	Rumah Tahanan TANJUNG PURA	3.87	3.91	31
742	Rumah Tahanan TAPAKTUAN	4	4	31
743	SEKRETARIAT JENDERAL	3.92	3.94	10

## B. DATA DUKUNG LAINNYA

### 1. HASIL AGREGAT SURVEI JANUARI 2025

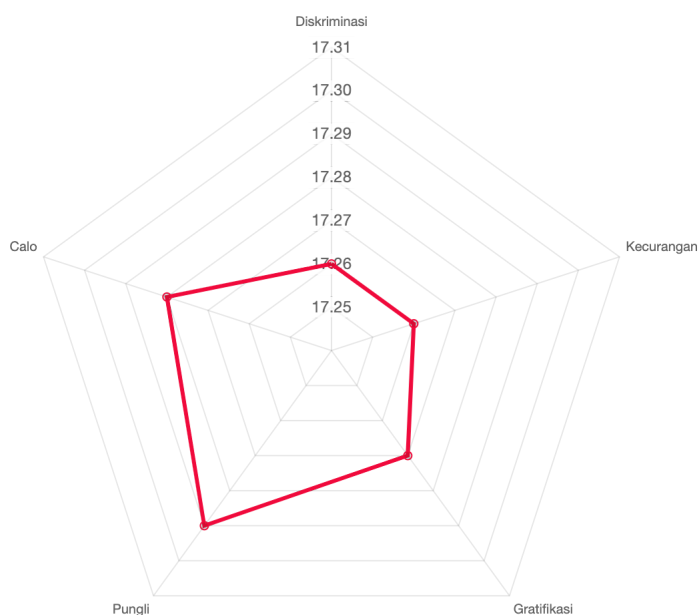
Jumlah Responden : 30,091

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	17.24	98.54	3.94	Sangat Baik
Persyaratan	17.24	98.51	3.94	Sangat Baik
Prosedur/Alur	17.25	98.57	3.94	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	17.24	98.50	3.94	Sangat Baik
Tarif/Biaya	17.24	98.54	3.94	Sangat Baik
Sarana Prasarana	17.25	98.55	3.94	Sangat Baik
Respon	17.25	98.57	3.94	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	17.24	98.50	3.94	Sangat Baik
<b>IKM</b>	<b>17.24</b>	<b>98.53</b>	<b>3.94</b>	<b>Sangat Baik</b>



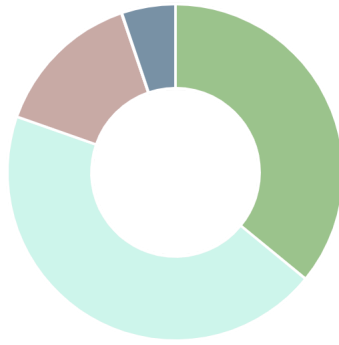
#### Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	17.26	98.61	3.94	Sangat Baik
Kecurangan	17.26	98.64	3.95	Sangat Baik
Gratifikasi	17.27	98.71	3.95	Sangat Baik
Pungli	17.29	98.80	3.95	Sangat Baik
Calo	17.28	98.72	3.95	Sangat Baik
<b>IPK</b>	<b>17.27</b>	<b>98.70</b>	<b>3.95</b>	<b>Sangat Baik</b>



## 2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer   Android   Apple iPhone   iPad   LG   Nexus   Nokia   Samsung



**Personal Computer** : 10,808  
**Android** : 13,377  
**Apple iPhone** : 4,335  
**iPad** : 4  
**LG** : 5  
**Nexus** : 5  
**Nokia** : 1  
**Samsung** : 1,556

### 3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

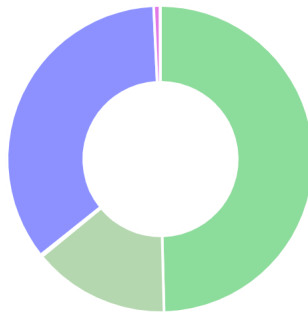
Chrome   Edge   Firefox   Mozilla   Opera   Safari



**Chrome** : 22,712  
**Edge** : 6  
**Firefox** : 2,954  
**Mozilla** : 11  
**Opera** : 49  
**Safari** : 4,359

### 4. Penggunaan (*Platform Operating System*)

Android   iOS   Linux   Mac OS X   Unknown Platform   Windows 10   Windows 7  
 Windows 8   Windows Phone



**Android** : 14,937  
**iOS** : 4,339  
**Linux** : 8  
**Mac OS X** : 56  
**Unknown Platform** : 1  
**Windows 10** : 10,537  
**Windows 7** : 204  
**Windows 8** : 3  
**Windows Phone** : 6